



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera



DPR – RI, Gd. Nusantara I Lt. III, JL. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270

Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090 , Fax. (021) 575 6086

=====

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
KETERANGAN PEMERINTAH ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
TAHUN ANGGARAN 2022 BESERTA NOTA KEUANGAN**

Disampaikan Oleh : Dr. H. Hermanto, S.E., M.M.
Nomor Anggota : A-415

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan dan Anggota DPR RI, Saudara Menteri beserta jajaran, serta hadirin yang kami hormati.

Pertama-tama, perkenankan kami mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan semesta alam, pemilik kekuasaan yang ada di langit dan di bumi. Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, yang telah memberikan anugerah kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Kita bersyukur bersama seluruh rakyat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, dapat memperingati dan merayakan 76 tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) walau dalam keadaan pandemi Covid-19. Fraksi PKS sangat optimis dan percaya dengan semangat Kemerdekaan RI dan Tahun Baru Hijriyah bahwa kita semua dapat keluar dari krisis ini selama kita bersatu, saling

tolong menolong, bantu membantu, dan bahu-membahu sebagai kesatuan anak bangsa.

Melalui Pidato Kenegaraan dan Keterangan Pemerintah Atas RUU Tentang APBN Tahun 2022, beserta Nota Keuangan yang telah disampaikan oleh Presiden, maka dapat memberikan pemahaman bagaimana capaian-capaian dan tantangan yang telah kita hadapi sebagai satu kesatuan perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Memasuki usia 76 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan tujuh tahun tahun Pemerintahan Presiden Jokowi kita masih diliputi oleh persoalan-persoalan ekonomi yang fundamental dan diperburuk oleh pandemi Covid-19.

Mencermati krisis besar kesehatan yang terjadi pada beberapa minggu lalu, Fraksi PKS menilai bahwa Pemerintah masih belum memiliki *road map* kebijakan yang jelas dan menyeluruh dalam menangani Covid-19. Hal ini mengakibatkan kebijakan yang dilakukan Pemerintah menjadi bersifat reaktif sporadis dan tidak menyeluruh, sehingga berkesan tidak berdasarkan ilmu pengetahuan yang cukup (Evidence-Based Policy), dan pengelolaan data, pengalaman, kemampuan SDM, serta birokrasi yang baik dan efektif. Sehingga beberapa minggu yang lalu virus covid-19 varian delta masuk menyebar dengan cepat di Indonesia dan terlihat di luar skenario pencegahan dan penanganan oleh pemerintah.

Menko
Perekonomian
BNPB
Kemenkes
Menko marves
BKF
DJA (SD 2)

Hadirin yang Kami Hormati,

Fraksi PKS memandang secara umum bahwa RAPBN tahun 2022 yang diajukan menunjukkan tidak ada yang istimewa dari target Pemerintah dalam menunaikan janji-janji ekonomi pada masa kampanye. RAPBN tahun 2022 membutuhkan penajaman agar lebih sehat, kredibel dan lebih pro-rakyat di masa pandemi ini, serta berdampak lebih optimal bagi kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1. Fraksi PKS juga memandang bahwa APBN 2022 adalah APBN Prakondisi yang akan menentukan beban target pemerintah di tahun 2023 termasuk target defisit di bawah 3 persen PDB.

Selanjutnya Fraksi PKS untuk menyampaikan catatan-catatan secara khusus sebagai berikut:

Asumsi Makro Ekonomi

1. Fraksi PKS menyoroti target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam bentuk interval yaitu 5 sampai 5,5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak yakin terhadap target yang akan dicapai pada 2022. Kondisi ini akan memberikan sinyal yang tidak baik bagi pelaku ekonomi baik dunia usaha maupun investor karena mereka akan relatif sulit untuk merencanakan bisnis ketika target pertumbuhan ekonomi tidak bisa ditetapkan dengan angka yang lebih presisi. Selain masalah interval, margin antara 5 hingga 5,5 persen sangatlah lebar. Sebelumnya target pertumbuhan ekonomi ditetapkan dalam satu angka nominal tertentu. Selain itu, target dalam bentuk interval menyebabkan sulitnya melakukan evaluasi baik oleh ekonom maupun akademisi.
2. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk mencapai target-target pembangunan di bidang ekonomi maupun sosial sebagai wujud pertanggungjawaban kepada rakyat. Pencapaian target tersebut merupakan pemenuhan amanat rakyat yang ditetapkan di dalam konstitusi. Selama ini, RPJMN sebagai turunan janji-janji politik pemerintah tidak sepenuhnya dicapai sehingga berbagai indikator ekonomi dan sosial memburuk. Kesejahteraan rakyat pun menurun karena berbagai kebijakan ekonomi tidak pro rakyat kecil. Fraksi PKS juga menegaskan bahwa kegagalan mencapai target RPJMN 2015-2019 jangan terulang kembali pada RPJMN 2020-2024. Jika merujuk pada data RPJMN 2020-2024, target pertumbuhan 5 sampai 5,5 persen masuk kategori rendah dan sedang. Dokumen RPJMN menetapkan target pertumbuhan pada tiga skenario yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Pada kategori rendah ditetapkan target pertumbuhan 5,3 persen sedangkan untuk target sedang 5,4 persen dan target tinggi 5,7 persen. Dengan melihat data tersebut sejak awal memang pemerintah tidak berani menetapkan target pertumbuhan ekonomi dalam satu angka.

Menko
Perekonomian
Bappenas
BKF
DJA (SD 1)

Bappenas
BPS
BKF
DJA (SD 1)

3. Fraksi PKS menilai bahwa pencapaian ekonomi 2022 sangat tergantung dari kemampuan pemerintah untuk menekan penyebaran covid-19 di Indonesia khususnya yang disebabkan oleh varian Delta serta mengantisipasi kemungkinan munculnya varian-varian baru yang lebih ganas. Jika hal tersebut tidak dapat dilakukan maka Indonesia akan menjadi negara yang sangat terpuruk karena pandemi covid 19 yang berdampak pada kegagalan mencapai target-target ekonomi maupun sosial. Implikasinya ekonomi semakin sulit dan kehidupan rakyat semakin sengsara. Sejak munculnya pandemi covid-19 tahun 2020, penanganan kasus di Indonesia sangat menyita perhatian negara-negara di dunia. Pemerintah lebih condong ke aspek ekonomi dibandingkan aspek kesehatan, baik dari sisi anggaran pemulihan maupun kebijakan-kebijakan yang diambil. Melihat buruknya penanganan dan parahnya penyebaran pandemi covid 19 di Indonesia, sejumlah negara meresponnya lewat berbagai tindakan. Bagian pertama mengeluarkan *travel warning* dan melarang warga negaranya ke Indonesia. Tentu, langkah tersebut akan merugikan bagi Indonesia serta baik dari sisi ekonomi maupun persepsi global terhadap ekonomi maupun terhadap pemerintah. Selain itu beberapa negara pun telah melakukan evakuasi warga-warganya yang ada di Indonesia untuk menghindari terjangkitnya covid-19.
4. Fraksi PKS mendesak pemerintah menggali potensi-potensi ekonomi baru di dalam negeri untuk mengurangi kebergantungan pada ekonomi global. Langkah ini sangat penting untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dari pandemi covid-19. Sebagaimana diketahui, sebagian besar perekonomian Indonesia dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Selain itu, Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pada 2022 karena sejak 2015 pemerintah selalu gagal mencapai target tersebut. Pemulihan ekonomi mitra dagang Indonesia harus dapat dimanfaatkan sehingga ekonomi terakselerasi dalam angka yang lebih tinggi. Triwulan ii-2020, ekonomi Tiongkok tumbuh 7,9%; Amerika Serikat 12,2%; Singapura 14,3%; Korea Selatan 5,9%; Vietnam 6,6%; Hongkong 7,5% dan Uni Eropa tumbuh 13,2%. Peluang-peluang peningkatan

Menko
Perekonomian
Bappenas
Kemenkes
BKF
DJA (SD 1, SD
2)

Bappenas
BPS
BKF
DJA (SD 1)

ekspor dan investasi dapat dimaksimalkan sehingga mampu menambal pelemahan konsumsi rumah tangga.

5. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan. Dari sisi penggunaan, konsumsi rumah tangga ditargetkan 5-5,3% pada tahun 2022. Angka tersebut cukup tinggi dari *outlook* pertumbuhan tahun 2021 yang mencapai 2,2-2,8%. Sementara itu, konsumsi pemerintah ditargetkan tumbuh 2,8-4,5% dengan *outlook* 2021 sebesar 3,9-4,6%. Pada posisi ini terlihat bahwa target pertumbuhan konsumsi pemerintah relatif lebih rendah di tahun 2022. Padahal, saat krisis konsumsi pemerintah diharapkan bisa menopang pertumbuhan ekonomi dengan menggantikan peranan sektor-sektor lain yang cenderung menurun. Sementara itu PMTB ditargetkan tumbuh 5,6-7% di tahun 2022 sedangkan *outlook* 2021 mencapai 4,7-6,1%. Harapan untuk tumbuh tinggi tahun 2022 memang relatif sulit jika pertumbuhan PMTB tidak maksimal. Tantangannya adalah masih buruknya iklim investasi di dalam negeri di tengah-tengah ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih. Ekspor dan impor barang dan jasa masing-masing ditargetkan 5,8 hingga 7,9% dan 6% sampai 8,6%. Angka ini cukup tinggi di tengah-tengah kemampuan dan penetrasi dari barang-barang ekspor Indonesia relatif rendah (tidak berdayang saing). Sementara *outlook* pertumbuhan ekspor dan impor masing-masing 11,7-14,6% dan impor 12,2-16%

6. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk sigap mengidentifikasi sumber-sumber krisis sehingga dapat menyiapkan berbagai antisipasi. Sebagaimana diketahui siklus krisis semakin pendek sehingga potensi tekanannya pun semakin sering. Kegagalan mengidentifikasi sumber krisis berujung pada kegagalan menyiapkan langkah-langkah antisipasi sehingga dampak krisis semakin dalam. Biaya (fiskal dan nonfiskal) pun semakin mahal ketika gagal mencegah krisis. Selama ini, sumber krisis lebih dilihat dari sektor keuangan maupun fiskal. Sementara itu, krisis dari sektor kesehatan tidak mampu diidentifikasi. Saat krisis covid-19 terjadi, Indonesia tidak siap. Apalagi kehadiran varian delta yang sangat ganas semakin menyulitkan Indonesia dalam penanganannya. Ketidaksiapan tersebut terpantau dari rendahnya

Bappenas
BPS
BKPM
BKF
DJA (SD 1)

Kemenkes
BNPB
DJA
- Abid PMK
- (SD 2)

infrastruktur di sektor kesehatan. Hal yang sangat sering terlihat bahwa pasien menumpuk di rumah sakit dan banyak tenaga kesehatan yang menyerah (*resigned*).

7. Fraksi PKS menilai salah satu bagian paling penting dari asumsi makroekonomi adalah pertumbuhan sehingga target yang ditetapkan sangat krusial untuk dicapai. Kegagalan mencapai target pertumbuhan dan kualitasnya sama artinya kegagalan memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pencapaian pertumbuhan ekonomi pun semakin mendesak di tengah-tengah pandemi covid-19. Rakyat semakin menderita dan terjebak dalam garis kemiskinan karena terpasungnya aktivitas ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, kegagalan mencapai target pertumbuhan ekonomi tidak boleh lagi terjadi karena rakyat sudah terpuruk baik sebelum pandemi covid-19 maupun saat ini. Selain masalah kesejahteraan yang semakin menurun, kegagalan pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi diproyeksi menjebak Indonesia di dalam negara berpendapatan menengah (*middle income trap*). Tentu, situasi tersebut menenggelamkan impian menjadi lima besar perekonomian terbesar di dunia.

Menko
Perekonomian
BKF
DJA (SD 1)

8. Fraksi PKS menilai bagian terpenting dari pencapaian pertumbuhan ekonomi adalah kualitas yang dihasilkan (pertumbuhan inklusif). Pertumbuhan inklusif pada gilirannya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat bukan hanya golongan tertentu khususnya orang-orang kaya. Nyatanya, pertumbuhan ekonomi Indonesia sulit dirasakan oleh rakyat menengah ke bawah karena penguasaan sumberdaya ekonomi yang timpang. Golongan menengah ke bawah memiliki akses terbatas ke pusat-pusat produksi, distribusi hingga konsumsi, yang pada akhirnya menjebak mereka dalam pusaran kemiskinan. Fraksi PKS mendesak diwujudkannya keadilan ekonomi sehingga distribusi kegiatan ekonomi merata. Dengan demikian pertumbuhan berkualitas dan inklusif dapat segera diwujudkan. Tantangan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif semakin berat karena pandemi covid 19 menyebabkan ekonomi golongan menengah ke bawah terpuruk dan lumpuh. Hal itu terekam dari tingginya angka pengangguran dan kemiskinan selama pandemic covid-19. Oleh karena itu, Fraksi PKS mendesak pemerintah mengeluarkan kebijakan-

Menko
Perekonomian
Bappenas
BKF
DJA (SD 1)

kebijakan yang dapat memulihkan ekonomi rakyat kecil. Sementara itu, ekonomi golongan atas terus tumbuh dan bahkan jumlah orang kaya di Indonesia meningkat selama pandemi covid-19. Jumlah rekening bernominal di atas Rp5 miliar, misalnya, tumbuh sekitar 8% (yoy) per Mei 2021.

9. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi Indonesia sebagai penentu pemulihan kehidupan rakyat. Fraksi PKS melihat rakyat sudah terlalu lama terjebak dalam situasi sulit baik sebelum pandemi covid-19 maupun saat pandemi yang sedang berlangsung. Pemulihan ekonomi harus didorong oleh pelaku ekonomi kecil khususnya sektor Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Fraksi PKS menilai selama ini peranan UMKM semakin menurun karena kebijakan pemerintah yang cenderung mengarah kepada korporasi besar. Padahal UMKM berperan penting bagi perekonomian nasional baik dalam pembentukan PDB, penyerap tenaga kerja, ekspor nonmigas hingga investasi. Tantangan untuk memulihkan pelaku ekonomi kecil seperti UMKM sangat berat setelah kegiatan ekonomi mereka lumpuh karena pandemi covid-19. Banyak UMKM terpaksa tutup karena kehabisan modal. Ketika sumber penghasilan mereka hilang maka mereka terseret ke kubangan kemiskinan. Sebagaimana diketahui bahwa jumlah UMKM di Indonesia mencapai 60 juta. Dapat dibayangkan jika separuh dari UMKM tersebut tutup dan bagaimana dampaknya bagi ekonomi Indonesia. Selain itu UMKM juga masih memiliki beban dalam cicilan di sektor perbankan. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah maupun otoritas perbankan sehingga dapat memberikan bantuan untuk penyelesaian pinjaman UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi beban pelaku UMKM dari dampak pandemi covid-19. Bagian penting lainnya adalah bagaimana merawat UMKM yang tersisa sehingga tidak terseret ke dalam krisis pandemi covid-19. Fraksi PKS melihat salah satu langkahnya adalah melalui dukungan integrasi UMKM ke platform digital sehingga pemasaran semakin luas.
10. Fraksi PKS melihat menilai bahwa pemulihan ekonomi 2022 sangat tergantung dari dukungan sektor perbankan. Sebagaimana diketahui selama pandemi covid 19 sektor perbankan fungsi intermediasi lumpuh, yang tergambar dari pertumbuhan kredit negatif ditengah-tengah pertumbuhan

Menko
Perekonomian
Menkop UKM
Bappenas
BKF
DJA
(SD 3, 4, 5)

dana pihak ketiga (DPK). Setelah tumbuh negatif dalam durasi yang cukup lama, kredit per Juni 2021 tumbuh tipis 0,59% (yoy). Kredit investasi masih turun 0,41% (yoy) sedangkan kredit modal kerja dan kredit konsumsi masing-masing tumbuh 0,34% (yoy) dan 1,96% (yoy). Dari sisi lapangan usaha, kredit sektor perdagangan dan eceran tumbuh 0,63% (yoy) sedangkan kredit sektor industri pengolahan masih turun 1,59% (yoy). Sementara itu dana pihak ketiga tumbuh 11,28% (yoy) dimana giro tumbuh 17,43% (yoy); tabungan tumbuh 13,07% (yoy) dan deposito tumbuh 6,32% (yoy). Tingginya pertumbuhan giro menunjukkan bahwa aktivitas sektor riil belum pulih sehingga dana giro menumpuk. Pada bagian lain, alokasi dana perbankan semakin meningkat pada penempatan obligasi. Pertengahan Agustus 2021 kepemilikan SBN bank umum (bank konvensional dan bank syariah) mencapai Rp1.513 triliun (angka tersebut mencapai 35% dari total SBN *tradable*). SBN yang dimiliki bank umum konvensional mencapai Rp1.442 triliun sedangkan bank syariah mencapai Rp70,98 triliun. Pada awal pandemic covid-19 (Maret 2020) kepemilikan SBN bank umum mencapai Rp763 triliun dimana bank konvensional memegang Rp731 triliun dan bank syariah Rp31,57 triliun. Sepanjang pandemi covid-19 (Maret 2020-Agustus 2021) nilai SBN bank umum tumbuh 98%. SBN bank umum konvensional naik 97% sedangkan bank syariah naik 124%.

BI
OJK
DJPPR
DJA (SD 1, 5)

11. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk memacu perbaikan iklim investasi untuk mendorong realisasi penanaman modal. Penanaman modal sangat dibutuhkan dalam pemulihan ekonomi nasional. Tantangan menarik investor global sangat berat karena iklim investasi global dan nasional yang belum kondusif. Investor global *wait and see* dalam penempatan dana sedangkan investor domestik lebih memilih investasi di pasar keuangan. Data Kementerian Investasi (2021) menunjukkan realisasi penanaman modal selama tahun 2020 hanya tumbuh 2,1% (yoy). Penanaman modal dalam negeri (PMDN) tumbuh 7% (yoy) dan penanaman modal asing (PMA) tumbuh - 2,4% (yoy). Selain itu, Fraksi PKS mengkhawatirkan ketimpangan distribusi realisasi PMDN dan PMA yang semakin terkonsentrasi pada sektor jasa (*nontradable*). Sektor transportasi gudang dan telekomunikasi dengan

Kemen
Investasi/BKPM
BKF
DJA (SD 1)

realisasi mencapai Rp144 triliun atau 17,5% dari total realisasi PMDN dan PMA. Sementara itu, penanaman modal sektor listrik gas dan air mencapai Rp102 triliun atau 12,3%; sektor industri logam dasar barang logam dan bukan mesin dan peralatannya terealisasi Rp94,8 triliun atau 11,5%. Semakin dominannya realisasi penanaman modal pada sektor jasa berdampak buruk pada penyerapan tenaga kerja.

12. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi sehingga menarik realisasi investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sampai saat ini iklim investasi Indonesia relatif buruk dibandingkan negara-negara kawasan. Kesimpulan tersebut didukung oleh fakta bahwa ICOR di Indonesia masih di atas 6% sedangkan negara-negara yang sudah bergerak di bawah 5%. Situasi yang demikian menyebabkan daya saing Indonesia sangat buruk dimata investor global sehingga Indonesia bukan merupakan tujuan utama untuk berinvestasi. Yang paling tidak khawatir adalah investor-investor bisa saja berpindah ke negara-negara lain yang memiliki iklim lebih baik dengan biaya berusaha murah seperti Vietnam. Tantangan meningkatkan realisasi investasi semakin kompleks karena buruknya dampak pandemi covid-19 di Indonesia.

Kemen
Investasi/BKPM
BKF
DJA (SD 1)

13. Fraksi PKS mendesak pemerintah mendorong perbaikan sektor-sektor *tradable* karena menjadi sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Sektor tersebut berperan tinggi dalam pembentukan PDB, penyerapan tenaga kerja, ekspor hingga investasi. Pemulihan sektor-sektor tersebut menjadi prasyarat pemulihan ekonomi Indonesia. Untuk mendorong pemulihan tersebut Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk meningkatkan stimulus fiskal dan nonfiskal dan mendesak sektor keuangan untuk meningkatkan alokasi pembiayaan. Alokasi kredit ke sektor industri pengolahan, pertambangan dan pertanian semakin menurun setiap tahunnya. Jika kondisi ini terus berlanjut maka ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja semakin tinggi. Triwulan ii-2020, kontribusi sektor industri pengolahan hanya 19,29% dengan pertumbuhan di bawah pertumbuhan ekonomi. Penyerapan tenaga kerja sektor industri mencapai 17,82 juta atau 13,61% dari total tenaga kerja Indonesia.

Kemenaker
Kemen
Perindustrian
Kemen
Perdagangan
Bappenas
BKF
DJA (SD 1)

14. Fraksi PKS mengingatkan kembali berbagai persoalan yang dihadapi oleh industri pengolahan Indonesia yaitu (i) masalah pelik dalam penyediaan bahan baku; (ii) persoalan infrastruktur baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur yang mendukung sektor industri seperti pelabuhan dan infrastruktur di kawasan industri; (iii) industri Indonesia mengalami kekurangan utilitas khususnya listrik, air, dan gas serta pengolahan limbah; (v) daya saing industri baik dari serbuan barang impor maupun kemampuannya bersaing di luar negeri; (vi) masalah harga input penting bagi industri khususnya gas; (vii) UMKM belum terintegrasi langsung dengan sektor industri; (viii) masalah dukungan pembiayaan baik dari investasi maupun perbankan; (viii) Masalah kebergantungan teknologi asing sehingga membebani biaya produksi.

Kemenn
Perindustrian
Bappenas
Menko
Perekonomian
DJA (SD 1)

15. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk memperhatikan perkembangan sektor pertanian karena sektor ini sangat vital bagi perekonomian Indonesia. Kontribusinya terhadap PDB terus menurun sedangkan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian tetap tinggi. Menurut data BPS, penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 38,78 juta atau 29,59% dari total tenaga kerja Indonesia pada Februari 2021. Pada triwulan ii-2021 kontribusi sektor pertanian mencapai 14,27%. Selama pandemi covid 19 dapat dikatakan bahwa sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang tetap tumbuh positif selama covid 19. Selain data-data tersebut, keberadaan sektor pertanian memang menjadi sangat penting bagi Indonesia khususnya untuk memenuhi kebutuhan pangan. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan pemerintah harus pro terhadap sektor tersebut. Selama ini terlihat bahwa pemerintah tidak begitu memperhatikan sektor pertanian, yang terlihat dari berbagai kebijakan khususnya dalam pemenuhan kebutuhan bahan pangan lewat keran impor. Yang paling menyakitkan bahwa impor dilakukan pada saat petani panen.

Kementan
Menko
Perekonomian
BKF
DJA (SD 1)

16. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk menghentikan kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif terhadap upaya-upaya pemulihan ekonomi dari pandemi covid-19. Salah satu perkembangan yang menyita perhatian rakyat adalah rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN). Rencana tersebut sangat

DJP
BKF
DJA (SD 1)

disayangkan karena menggerus daya beli rakyat di tengah-tengah ekonomi yang terus memburuk. Bagaimana pun pemerintah harus peka terhadap kehidupan rakyat dan jangan menambah beban yang sudah berat. Pemerintah pun tidak bijak jika membebaskan pemulihan ekonomi kepada rakyat lewat kenaikan PPN.

17. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk fokus pada penanganan korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi bukan hanya mengamankan uang negara tetapi juga memperbaiki persepsi terhadap risiko Indonesia (*country risk*). Selain itu, persepsi korupsi juga menjadi indikator daya saing dan pada akhirnya menentukan realisasi penanaman modal. Indeks persepsi korupsi di Indonesia terus memburuk. Hal tersebut menyebabkan ekonomi merugi dan rakyat semakin sengsara. Uang yang dikorupsi merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.

KPK
Kejaksanaan
Polri
BPK
Menko
Polhukam
DJA
(SD 2)

18. Fraksi PKS menilai target inflasi 3% tahun 2022 terlalu tinggi seharusnya dapat ditargetkan lebih rendah. Pemerintah menetapkan *outlook* inflasi 2021 mencapai 1,8-2,5%. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk menurunkan inflasi bahan makanan karena menjadi cerminan mahal nya harga kebutuhan pokok di tanah air. Inflasi umum memang terus menurun tetapi inflasi bahan pangan tetap tinggi. Saat pandemi covid-19 terjadi, ekonomi terpuruk dan pendapatan rakyat nyaris hilang. Jika pun tetap bekerja, upah pekerja sulit naik karena ekonomi tidak stabil. Ketika harga bahan-bahan pokok terus melambung maka penderitaan rakyat semakin besar. Data terakhir menunjukkan pada Juli 2021, inflasi umum mencapai 1,52%; inflasi inti 1,4%; harga diatur pemerintah 0,601%; inflasi bergejolak mencapai 2,97%; inflasi energi negatif 0,09% sedangkan inflasi makanan 3,03%. Tingginya inflasi makanan sangat mengkhawatirkan karena sebagian besar masyarakat mengalokasikan 2/3 dari penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dengan memperhatikan pergerakan inflasi pangan, Fraksi PKS mengusulkan agar inflasi tersebut menjadi salah satu target asumsi makro ekonomi. Inflasi tersebut lebih mencerminkan situasi yang dihadapi masyarakat dibandingkan inflasi umum.

BI
BPS
BKF
DJA (SD 1)

19. Fraksi PKS mendesak pemerintah memenuhi kebutuhan pokok rakyat lewat perbaikan produksi nasional bukan dari impor. Impor yang terus terjadi ketika panen rakyat mencederai hati rakyat. Situasi ini sangat jamak terjadi. Terlihat bahwa pemerintah tidak peduli terhadap ekonomi kecil seperti petani. Padahal, petanilah yang menjadi garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Ketidakberpihakan kebijakan menyebabkan kehidupan petani terus menurun. Nilai tukar petani (NTP) sulit naik karena nilai ekonomi hasil produksi pertanian jauh lebih rendah dari belanja yang dikeluarkan oleh petani. Sementara itu, petani semakin terhimpit oleh derasnya alih fungsi lahan menuju aktivitas non pertanian. NTP terus menurun dan belum pernah kembali ke level tertinggi pada 2004 sebesar 117.35. NPT tahun 2020 hanya 103,25; yang turun dari 104,46 pada tahun 2019. Data terakhir, NTP Juli 2021 mencapai 103,48.

Kemendag
Kementan
Menko
Perekonomian
Kemen
ATR/BPN
BKF
DJA (SD 1)

20. Fraksi PKS mendesak pemerintah meningkatkan efektivitas Tim Pengendali Inflasi baik di pusat maupun di daerah. Keberadaan tim tersebut diharapkan dapat menekan inflasi khususnya dari sisi produksi. Jenis inflasi ini menjadi inflasi utama di Indonesia yang pada gilirannya menekan daya beli. Salah satu bagian penting dari peranan tim pengendali inflasi di daerah adalah menyediakan data akurat tentang produksi bahan-bahan makanan sehingga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, ketika produksi melimpah maka tidak ada lagi kebijakan impor yang merugikan petani. Selain itu fraksi PKS juga meminta tim pengendali inflasi tersebut dapat bergerak ke desa-desa untuk menekan inflasi di pedesaan. Sebagaimana diketahui inflasi di pedesaan relatif lebih tinggi dibandingkan inflasi di perkotaan.

BI
Kemen
Perdagangan
BPS
BKF
DJA (SD 1)

21. Fraksi PKS menilai target nilai tukar terhadap nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar sebesar Rp14.350 terlalu pesimis sehingga harus ditetapkan lebih kuat. Penetapan Rupiah yang lebih kuat dapat memberikan sinyal yang lebih positif terhadap pelaku pasar maupun pelaku di sektor industri. Selain itu, Fraksi PKS mendesak otoritas moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar agar tidak bergerak jauh dari target. Stabilitas nilai tukar sangat krusial di tengah-tengah krisis pandemi covid-19 yang belum berakhir. Dampak ketidakstabilan Rupiah

BI
BKF
DJA (SD 1)

menyebabkan impor semakin mahal sehingga pemulihan industri pengolahan terhambat. Stabilitas nilai tukar juga menentukan biaya bunga utang yang harus disiapkan pemerintah. Selain itu, Fraksi PKS menilai stabilitas nilai tukar Rupiah sangat penting untuk dijaga karena menjadi salah satu sumber krisis.

22. Fraksi PKS memberikan beberapa catatan tentang faktor-faktor penentu stabilitas Rupiah tahun depan yaitu: (i) penanganan covid-19 di Indonesia. Hal ini menjadi indikator *country risk* yang sangat relevan saat ini. Covid yang gagal dijinakkan berdampak pada buruknya *country risk* sehingga mendorong investor meninggalkan Indonesia. Implikasinya Rupiah tertekan; (ii) risiko fiskal karena yang bukan hanya bersumber dari lonjakan utang karena pandemi covid-19 tetapi tumpukan utang dari tahun-tahun sebelumnya. Rasio utang pemerintah pusat terhadap PDB di atas 40%; (iii) *credit default swap* (CDS) tenor 5 tahun. CDS sempat mencapai 210 pada Maret 2020. Angka tersebut sangat tinggi dibandingkan dengan negara sekawasan seperti Malaysia mencapai 115 sedangkan Thailand hanya 65; (iv) relatif rendahnya cadangan devisa. Ukuran ketersediaan cadangan devisa pun hanya menghitung komponen-komponen kewajiban pemerintah seperti pembayaran utang serta impor industri. Untuk kebutuhan korporasi belum sepenuhnya dihitung.

23. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk memacu perbaikan neraca transaksi berjalan karena berpengaruh terhadap stabilitas nilai tukar. Perbaikan neraca transaksi berjalan dilakukan lewat peningkatan surplus neraca perdagangan dan menekan defisit neraca jasa dan neraca pendapatan. Indonesia memiliki pekerjaan rumah pada ketiga neraca tersebut. Pada neraca perdagangan, tantangan muncul dari kinerja ekspor yang masih bergantung pada perkembangan harga komoditas mentah. Selain itu, penetrasi ekspor masih pada negara-negara tradisional. Tantangan memperbaiki neraca jasa berasal dari kebergantungan neraca tersebut pada aliran wisatan asing. Sementara itu, upaya meningkatkan wisatawan asing relatif sulit saat pandemi. Persoalan neraca pendapatan muncul dari tingginya kebergantungan Indonesia pada dana asing sehingga aliran pendapatan dana asing tersebut tidak bisa dibendung. Hal ini pada akhirnya menekan Rupiah saat terjadi transfer modal

BI
BKF
DJA (SD 1)

BI
Kemen
Perdagangan
BPS
Kemenparekraf
BKF
DJA (SD 1)

dan keuntungan. Tahun 2020, defisit neraca transaksi berjalan sempat menurun menjadi 0,41% dari PDB yang disebabkan melemahnya kegiatan ekonomi. Dalam kondisi normal, defisit neraca transaksi berjalan bergerak mendekati 3% dari PDB.

24. Fraksi PKS menilai target tingkat suku bunga SUN 10 tahun terlalu tinggi. Pemerintah menetapkan target 6,82% pada tahun 2022. Penetapan target yang lebih rendah sangat penting mengingat beban cicilan bunga utang semakin tinggi. Belanja cicilan bunga utang telah mengambil porsi sekitar 20% dari belanja pemerintah pusat. Situasi tersebut berdampak pada penurunan alokasi belanja produktif cenderung menurun. Langkah-langkah menekan yield SBN harus dilakukan lintas lembaga. Pemerintah menjaga sisi fiskal, sedangkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan menjaga dari sisi moneter dan keuangan. Tahun 2021 *outlook* tingkat suku bunga SUN 10 tahun mencapai 6,34-7,24%. Saat pandemi, yield SBN cenderung meningkat sehingga biaya penerbitan SBN semakin tinggi. Yield SBN Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara sekawasan. Tahun 2020, yield SBN 5 tahun mencapai 5,18%; sedangkan untuk 10, 15, dan 20 tahun masing-masing 5,93%; 6,37% dan 6,51%. Data terakhir pada Juni 2021, yield SBN 5 tahun mencapai 5,36%; 10 tahun mencapai 6,56%; 15 tahun dan 20 tahun masing-masing 6,4% dan 7,24%. Fraksi PKS juga mendesak otoritas moneter dan otoritas perbankan memperdalam pasar keuangan domestik sehingga berpengaruh positif terhadap penurunan yield SBN. Pendalaman pasar keuangan domestik selain lewat peningkatan instrument-instrumen investasi (baik konvensional maupun syariah) tetapi juga meningkatkan porsi pelaku domestik. Perlu edukasi intensif khususnya bagi kaum millennial agar berpartisipasi dalam pembangunan perekonomian lewat kepelikan SBN.

BI
OJK
DJPPR
BKF
DJA (SD 1)

Indikator Kesejahteraan

25. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk menangani lonjakan angka pengangguran secara serius. Lonjakan pengangguran terlihat dari lonjakan klaim BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) dan klaim jaminan hari tua (JHT). Menurut BP Jamsostek, sampai 7 Agustus 2020, pekerja yang di-PHK

mencapai 538.305 orang dan diproyeksikan hingga akhir tahun 2021 sebanyak 894.579 pekerja. Fraksi PKS juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan dukungan fiskal maupun nonfiskal pada sektor-sektor padat karya. Hal ini sangat penting untuk mengurangi dampak lanjutan covid-19 dalam bentuk lonjakan pengangguran. Tanpa Industri padat karya, bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada 2024 justru akan menjadi bebat berat. Upaya menjaga kinerja sektor-sektor padat karya juga dapat dilakukan dengan pemberian insentif bagi PMDN dan PMA agar bergerak ke sektor tersebut. Lonjakan investasi pada sektor tersier dan penurunan investasi pada sektor sekunder akan berdampak buruk pada sektor ketenagakerjaan. Fraksi PKS juga mendorong pemerintah segera menyelesaikan persoalan mendasar di sektor ketenagakerjaan. Beberapa diantaranya adalah rendahnya produktivitas, pasar tenaga kerja yang rigid, *mismatch* antara kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya manusia di pasar tenaga kerja. Produktivitas yang rendah disebabkan oleh tingginya porsi tenaga kerja informal. Pemerintah harus meningkatkan program-program yang dapat memigrasi pekerja informal ke pekerja formal.

Kemenaker
Kemen
Investasi/BKPM
Menko Marinvest
BKF
DJA (SD 1)

26. Fraksi PKS mendesak pemerintah meningkatkan kualitas program-program yang berorientasi pada keluarga miskin. Pada Maret 2021, angka kemiskinan meledak. Angka kemiskinan naik menjadi 27,54 juta orang pada Maret 2021; Jika dibandingkan dengan data Maret 2020, jumlah penduduk miskin naik 1,12 juta orang. Penduduk miskin Indonesia terbanyak berdasarkan provinsi ada di Jawa Timur (4,6 juta orang), Jawa Barat (4,2 juta orang), dan Jawa Timur (4,1 juta orang). Fraksi PKS menuntut pemerintah untuk segera membuka dan meningkatkan lapangan kerja untuk mengurangi lonjakan angka kemiskinan. Selain itu, pemerintah perlu memastikan keterjangkauan harga pangan terutama, makanan pokok, telur, gula, hingga bumbu-bumbu dapur. Dukungan terhadap sektor pertanian harus terus dilakukan.
27. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk memacu penciptaan lapangan kerja. Menurut komponen ketersediaan lapangan kerja yang merupakan salah satu komponen Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) saat ini masih memburuk. Penurunan indeks ketersediaan lapangan kerja sudah berada di level

Menko
Perekonomian
Kemensos
BPS
Kemenaker
Bappenas
Kementan
Kemendag
BKF
DJA (SD 1)

terendah. Pada Mei 2021, komponen tersebut 77,4 poin sedangkan pada Juni naik sedikit menjadi 80,4. Sementara pada Juli 2021 anjlok menjadi hanya 50,1 poin. Penurunan tersebut terdampak dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Ekonomi (PPKM) akibat penanganan pandemi yang kurang konsisten.

Kemenaker
Menko
Perekonomian
Bappenas
BKF
DJA (SD 1)

28. Fraksi PKS mencermati kemungkinan Pemerintah akan kesulitan untuk memenuhi target IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang ditargetkan pada 2022 sebesar 73,41-73,46. Hal ini karena untuk realisasi target IPM 2020 sebesar 72,51 gagal tercapai, hanya meningkat 0,02 poin dibanding capaian sebelumnya dengan sebesar 71,94. Padahal, kenaikan pada tahun-tahun sebelumnya IPM biasa meningkat sekitar 0,5 sampai 0,6. Kemungkinan pemerintah untuk mencapai target IPM 2021 dan 2022 akan semakin berat. Pemerintah harus serius dalam membenahi peringkat IPM, mengingat IPM Indonesia berada di peringkat 107 dari 189 negara. Di kawasan asia tenggara Indonesia kalah dari Singapura (11), Malaysia (62), Thailand (79).

Menko PMK
Kemendikbud
Kemenkes
Bappenas
BKF
DJA (SD 1)

29. Fraksi PKS mendesak pemerintah konsisten memperbaiki nilai tukar petani (NTP). Pada 2020 NTP hanya mencapai 99,47 menjadi titik terendah. Sementara selama tahun 2021 NTP hanya sedikit membaik, pada Mei 2021 naik menjadi 103,39 persen atau naik 0,44 dari bulan sebelumnya. Untuk bulan Juni 2021 sebesar 103,59 atau naik 0,1 persen. Tetapi NTP kembali turun pada bulan Juli 2021 sebesar 0,11 persen menjadi 103,48. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) nasional Juli 2021 sebesar 103,77 juga mengalami penurunan sebesar 0,10 persen dibanding NTUP sebelumnya.

Menko
Perekonomian
Kementan
BKF
DJA (SD 1)

Penerimaan Negara

30. Fraksi PKS memandang Pemerintah perlu menyusun target pendapatan, terutama penerimaan perpajakan yang realistis. Pada periode 2014-2019, rata-rata realisasi Pendapatan Negara dan penerimaan perpajakan setiap tahun secara berturut-turut hanya sebesar 91% dan 88%. Target yang terlalu tinggi ini selalu diiringi dengan shortfall perpajakan pada tengah tahunnya, yang membuat Indonesia terpaksa melebarkan defisit anggaran yang akhirnya menambah beban utang.

DJP
BKF
DJA (SD 1)

31. Fraksi PKS mendorong Pemerintah untuk dasarnya perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan gejolak fiskal dengan menciptakan perancangan keuangan yang kredibel. Masih tingginya ketidakpastian karena belum tertanganinya pandemi dengan baik, melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat deindustrialisasi dini, ketergantungan atas harga komoditas global dan ketidakpastian perekonomian global perlu diantisipasi dari awal. Fraksi PKS menilai bahwa target pendapatan negara masih terlalu optimis, dimana dibandingkan dengan outlook 2021, maka target penerimaan perpajakan pada RAPBN 2022 mengalami pertumbuhan sebesar sampai 9,52 persen dengan catatan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,5 persen. Sebagai perbandingan, pada tahun 2019, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,02%, penerimaan perpajakan hanya tumbuh 1,8%. Target pendapatan negara juga, dengan skenario optimis juga akan tumbuh 6,17 persen dibandingkan outlook 2021.

DJP
DJBC
BKF
DJA - Dit PNB
(SD 1)

32. Fraksi PKS berpendapat Pemerintah harus waspada terhadap sejumlah sumber perpajakan memiliki resiko fiskal tinggi, seperti PPH badan, yang secara historis memiliki waktu pulih yang lebih lama paska adanya krisis ekonomi dibandingkan sumber perpajakan yang lain. Lebih lanjut, dengan masih lambatnya progress vaksinasi, baik di Indonesia, dan potensi gelombang Covid ke-3 di sejumlah negara, maka diperkirakan permintaan global masih lemah, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja pendapatan negara.

DJP
BKF
DJA (SD 1)

33. Fraksi PKS berpendapat bahwa kinerja keuangan Indonesia selama ini masih jauh dari harapan. Rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia hanya mencapai 14% atau peringkat empat terendah diantara negara-negara emerging. Salah satu problematika utamanya adalah masih rendahnya rasio perpajakan. Rasio perpajakan (*tax ratio*) yang pada awalnya di atas 11%, pada tahun 2019 hanya mencapai 9,76%, dan tahun 2020 semakin menurun menjadi 8,30%. *Tax ratio* tahun 2021 diprediksi hanya mencapai kisaran 8,25% sampai 8,63%, dan Pemerintah hanya menargetkan *tax ratio* pada tahun 2022 pada kisaran 8,37%-8,42%. Rendahnya rasio ini disebabkan oleh administrasi perpajakan yang masih belum baik, basis perpajakan yang masih

DJP
DJBC
BKF
DJA (SD 1)

relatif stagnan, serta adanya sektor yang under-tax dan didorong dengan pemberian insentif (belanja perpajakan) dalam jumlah yang sangat besar. Contohnya sektor konstruksi dan real estate yang kontribusi perpajakannya (2016-2020) hanya sebesar 5,8% persen, padahal kontribusi perekonomiannya (kepada PDB) mencapai 14 persen, atau sektor manufaktur yang kontribusi GDP mencapai 19%, tetapi kontribusi perpajakannya hanya mencapai 11%. Lebih lanjut, tax buoyancy Indonesia pada berada dikisaran 0,5, menunjukkan Indonesia memiliki potensi memperluas basis perpajakan.

34. Fraksi PKS juga berpendapat bahwa masih rendahnya kinerja perpajakan disebabkan masih belum kuatnya basis perpajakan pada masyarakat berpendapatan tinggi. Kontribusi Pajak penghasilan orang pribadi non-karyawan hanya mencapai 1,8%, dimana diperkirakan potensi perpajakannya yang belum terealisasi mencapai Rp 117 Triliun. Hal ini sebenarnya dapat menjadi sumber penerimaan baru yang dapat dimaksimalkan oleh Pemerintah.

DJP
BKF
DJA (SD 1)

35. Fraksi PKS berpendapat Pemerintah perlu mengatur kembali kebijakan belanja perpajakan sifatnya regresif dan masih jauh dari prinsip keadilan dan pemerataan pendapatan. Belanja perpajakan terus mengalami peningkatan signifikan, dimana pada tahun 2020 mencapai Rp 234 Triliun, atau meningkat lebih dari 20% dibandingkan tahun 2016.

DJP
BKF
DJA - Dit. A3
(SD 1)

36. Fraksi PKS berpendapat bahwa Pemerintah perlu mengoptimalkan pendapatan dari Bea dan Cukai. Bea dan Cukai termasuk pendapatan yang tidak terdampak besar pada kondisi resesi dan pandemi yang saat ini terjadi, dimana kontraksi pendapatan pada tahun 2020 hanya mencapai 0,2%. Untuk mendorong pendapatan dari pajak perdagangan internasional, Pemerintah perlu memperkuat sistem administrasi, mendorong optimalisasi sistem single submission hingga memperkuat pengawasan. Sedangkan dari sisi cukai, Pemerintah dapat mendorong optimalisasi dari cukai rokok. Saat ini rata-rata cukai untuk produk rokok baru mencapai 57,4%, masih sangat jauh dari standar yang ditetapkan WHO yang mencapai 75%.

DJBC
BKF
DJA (SD 1)

37. Fraksi PKS mengingatkan terkait kinerja program PEN, khususnya untuk insentif perpajakan, di tahun 2020 yang masih jauh dari optimal. Untuk

insentif perpajakan, dari pagu Rp 120 Triliun, realisasinya hanya mencapai 46,8%. Hal ini menjadi miss opportunity yang besar, terutama tambahan anggaran untuk program PEN dibiayai oleh tambahan utang, yang menjadi beban APBN ke depannya. Lebih lanjut, insentif perpajakan banyak dinikmati oleh pelaku usaha skala besar, bukan UMKM. Berdasarkan data, dari total nilai realisasi insentif perpajakan pada program PEN, hanya 1,17% yang dinikmati oleh UMKM.

DJP
DJBC
BKF
DJA (SD 1)

38. Fraksi PKS mengingatkan terkait rencana Pemerintah menaikkan tarif PPN (Intensifikasi). Berdasarkan RAPBN 2021, ditulis secara jelas bahwa strategi Pemerintah adalah perluasan basis perpajakan (ekstensifikasi). Perlu ada kejelasan dan konsistensi kebijakan dari Pemerintah. Fraksi PKS berpendapat kenaikan tarif PPN akan kontraproduktif dengan rencana pemulihan ekonomi nasional. Sumber PPN terbesar berasal PPN dalam negeri, berupa konsumsi masyarakat, dan PPN impor, yang merupakan konsumsi bahan modal dan bahan baku bagi industri. Artinya, kenaikan tarif PPN tidak hanya melemahkan daya beli masyarakat, tetapi juga akan meningkatkan tekanan bagi industri.

DJP
BKF
DJA (SD 1)

39. Fraksi PKS berpendapat pendapatan dari pajak pertambahan nilai masih jauh di bawah potensi yang ada. Rasio PPN terhadap PDB hanya mencapai 3,6%, sangat rendah dari standar negara-negara secara umum yang mencapai 6 hingga 9%. Sehingga, diperkirakan pada tahun 2018, potensi penerimaan PPN diperkirakan masih mencapai 32% dari potensi yang ada. Dibandingkan meningkatkan tarif yang akan berdampak kepada masyarakat secara umum, seharusnya Pemerintah fokus memperluas basis perpajakan PPN.

DJP
BKF
DJA (SD 1)

40. Fraksi PKS berpendapat bahwa strategi mendorong basis perpajakan melalui cukai plastik perlu dipertimbangkan secara matang. Pada satu sisi, konsumsi plastik yang berlebihan memang dapat menimbulkan biaya lingkungan. Tetapi di sisi lain, plastik juga banyak dikonsumsi oleh masyarakat berpendapatan rendah. Studi menunjukkan bahwa pasar modern menyumbang sampah plastik 30% dan pasar tradisional 70 persen. Artinya pengenaan cukai tanpa pertimbangan yang matang berpotensi melebarkan jurang ketimpangan sosial.

DJBC
BKF
DJA (SD 1)

41. Fraksi PKS mengkritisi strategi fiskal yang dilakukan dengan memberikan sejumlah insentif perpajakan untuk dunia usaha, terutama dunia usaha skala besar. Insentif perpajakan yang diberikan oleh Pemerintah pada tahun 2021 berupa penurunan tarif PPh badan hingga pembebasan PPh 22 impor. Fraksi PKS mengingatkan total belanja perpajakan yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah pada periode 2016-2020 mencapai di atas Rp 1000 Triliun. Selama ini skema untuk insentif perpajakan yang ada belum dapat mendorong lanju investasi. Perlu menjadi catatan penting, permasalahan utama yang menghambat investasi di Indonesia, terutama pada bidang perpajakan bukan pada tarif pajaknya, akan tetapi justru pada proses administrasi perpajakannya. Selama ini yang banyak dikeluhkan oleh dunia usaha dan investor adalah proses administrasi perpajakan yang sulit dan kurang transparan. Hal tersebut membuat dunia usaha dan investor enggan untuk menambah kapasitas investasinya. Sejumlah riset telah menyatakan bahwa untuk kasus negara berkembang, pemberian insentif perpajakan tidak efektif untuk mendorong investasi, selama masih ada permasalahan dalam birokrasi dan administrasi perpajakan.

DJP
DJBC
BKF
DJA (SD 1)

42. Fraksi PKS berpendapat Kebijakan fiskal Pemerintah seharusnya lebih menyentuh pada reformasi mendasar perpajakan Indonesia. Kualitas dan kuantitas tenaga pajak perlu terus ditingkatkan. Kemudahan birokrasi yang diikuti dengan perbaikan administrasi perpajakan seharusnya menjadi kunci utama. Selama Pemerintah masih sibuk mendahulukan besaran tarif perpajakan, dibandingkan perbaikan administrasi perpajakan, maka stagnansi tax ratio masih akan terus terjadi.

DJP
BKF
DJA (SD 1)

43. Fraksi PKS berpandangan stagnannya target PNBPN pada tahun 2021 sesuai dengan kondisi turunnya harga komoditas global. Fraksi PKS mendorong Pemerintah untuk terus mendorong potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum banyak tergali dan mendorong tingkat kepatuhan pembayaran. Rasio PNBPN terhadap PDB nasional terus mengalami penurunan setiap tahunnya, dari 3,8 persen (2014) menjadi hanya 1,69 persen (APBN 2021). Pasca disahkan UU No. 9 Tahun 2018 tentang PNBPN, Pemerintah seharusnya dapat melakukan langkah-langkah strategis, terutama dalam perbaikan

BKF
DJKN
DJA-Dit. PNBPN
(SD 1)

administrasi dan birokrasi, sehingga dapat mendorong tingkat kepatuhan dan pada akhirnya pertumbuhan PNBPNasional. Selain itu, Pemerintah perlu melakukan optimalisasi pada pengelolaan aset-aset nasional yang saat ini memiliki nilai mencapai Rp 10.400 Triliun. Untuk mendorong PNBPNasional, maka aset tersebut didorong produktifitasnya dengan me

44. Fraksi PKS berpendapat Pemerintah tidak boleh bergantung pada PNBPNasional SDA yang sangat rentan dengan volatilitas global. Pemerintah perlu mengoptimalkan pengelolaan BMN, BUMN, serta BLU sehingga dapat mendorong penerimaan PNBPNasional. Pendapatan BLU pada tahun 2019 berkontribusi sebesar 12 persen dari total PNBPNasional, dan pada tahun 2020 diperkirakan meningkat kontribusinya menjadi 18,9 persen. Tentu potensi tersebut dapat terus dikembangkan.

DJKN
DJPB
DJA-Dit.PNBPNasional
(SD 1)

Belanja Pemerintah Pusat

45. Fraksi PKS memandang bahwa Belanja Negara dalam APBN tahun 2022 masih harus fokus terhadap pencegahan dan penanganan krisis kesehatan akibat virus Covid-19. Kemudian belanja negara fokus terhadap penanganan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Fraksi PKS berpendapat bahwa Pemerintah sudah harus mulai berfikir tidak hanya menangani namun mulai dapat melakukan lokalisasi penyebaran virus dan juga menstimulus atau memfasilitasi agar daya imunitas rakyat terhadap virus meningkat termasuk mendorong dan melakukan edukasi agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Tidak hanya menjadikan program vaksinasi sebagai faktor utama dalam penanganan Covid-19.
46. Fraksi PKS mencermati bahwa Belanja Negara dalam RAPBN 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan APBN 2021 sebesar Rp41,3 triliun menjadi Rp2.708,7 triliun. Belanja Pemerintah Pusat di dalam RAPBN 2022 mengalami penurunan Rp16,2 triliun menjadi Rp1.938,3 yang sebelumnya Rp1.954,5 di dalam APBN 2021. Hal ini memberikan defisit 4,85 persen setelah dihitung dengan Pendapatan negara dalam RAPBN 2022. Fraksi PKS berpendapat bahwa APBN tahun 2022 merupakan prakondisi agar target

Menko
Perekonomian
Kemenkes
BNPB
BKF
DJA-Dit. Abid
PMK
(SD 2)

pemerintah di tahun 2023 terkait dengan defisit di bawah 3 persen dapat terwujud. Sehingga pemerintah perlu menyiapkan langkah-langkah perencanaan sejak tahun 2022 yang dapat terukur dan jelas serta terarah agar beban defisit di bawah tiga persen dari PDB tidak menjadi terlalu berat di APBN 2023. Namun, perlu untuk menjadi perhatian Pemerintah bahwa pelaksanaan untuk mencapai target tersebut jangan sampai membuat kondisi ekonomi masyarakat utamanya yang berada di golongan rentan dan miskin menjadi semakin tertekan dan berat. Program Subsidi dan Bantuan Sosial untuk masyarakat ekonomi lemah dan terdampak oleh pandemi Covid-19 agar lebih ditingkatkan. Karena, pada akhirnya semakin sejahtera rakyat, maka kontribusi terhadap negara berupa pajak juga dapat semakin meningkat.

Kemensos
Menko PMK
TNP2K
Bappenas
BKF
DJA-
Dit. Abid
PMK, Dit. Abid
Polhukhankam
BABUN
(SD 3, 4)

47. Fraksi PKS mendesak Pemerintah agar memastikan ketepatan penerima dan ketepatan manfaat dan pencegahan risiko korupsi terhadap belanja perlindungan sosial Covid-19. Pemerintah perlu memperbaiki basis data penerima seperti DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan tata kelola pelaksanaan belanja bantuan sosial. Berdasarkan data BPS Agustus 2020, sebanyak 60,47 persen orang yang bekerja adalah pekerja informal berpenghasilan tidak tetap, baik dari pekerjaan sektor pertanian maupun non-pertanian. Dari kelompok pekerja formal, sekitar 17,48 juta adalah pekerja di sektor manufaktur yang sebagian besar bekerja dengan upah harian. Oleh karena itu, Fraksi PKS berpendapat bahwa belanja perlindungan sosial menjadi penting dan mendesak dalam APBN 2022. Fraksi PKS mencatat bahwa dalam RAPBN 2022 belanja untuk perlindungan sosial mengalami pengurangan dari Rp498,0 triliun tahun 2020 menjadi Rp427,5 triliun. Fraksi PKS mengingatkan Pemerintah bahwa pengurangan anggaran ini harus mempertimbangkan jumlah peningkatan dan penurunan tingkat masyarakat ekonomi rentan dan miskin.

Kemensos
TNP2K
Menko PMK
BPS
BKF
DJA-Dit. Abid
PMK
(SD 3)

48. Fraksi PKS mengingatkan Pemerintah dengan serius agar melihat rakyat tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara yaitu pajak, tapi juga harus melihat lebih mendalam dari sisi bagaimana caranya agar rakyat miskin dan rentan dapat tetap hidup dan dapat membayar pajak di tengah himpitan situasi pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi yang mengancamnya. Sehingga,

belanja negara perlu untuk difokuskan terhadap aktifitas yang menstimulus dan berdampak langsung terutama terhadap kehidupan rakyat miskin. Pemerintah hendaknya merancang dengan serius dan menata kebijakan Belanja dalam APBN tahun 2022 dengan melakukan penguatan spending better melalui pengendalian belanja agar lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkan multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian serta efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pencegahan dan Penegakan hukum terhadap kejahatan berupa penyimpangan, penyalahgunaan, dan korupsi dalam pelaksanaan belanja negara harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Fraksi PKS mendesak Pemerintah untuk melakukan Efisiensi biaya birokrasi pusat dan daerah, mitigasi terhadap pelbagai kemungkinan dan kebutuhan penting-mendesak, serta memperkuat pondasi ekonomi agar kedepannya dapat terbebas dari *middle income trap*. Pemerintah wajib melakukan *spending better* dan mempertimbangkan value for money dari setiap rupiah yang dibelanjakan.

Bappenas
Kemendagri
BKF
DJPK
DJA-Dit. Abid,
DSP
(SD 2, 3)

49. Fraksi PKS memandang bahwa pandemi ini semakin mendesak Pemerintah agar dapat melakukan reformasi struktur ekonomi yang bersifat jangka panjang agar pertumbuhan ekonomi dapat berkualitas dan berterusan. Fraksi PKS mendorong agar struktur ekonomi kita yang selama ini lebih dari 55% dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga, agar dapat ditransformasi menjadi lebih produktif dengan mendorong hilirisasi, investasi dan ekspor. Salah satunya adalah belanja pembangunan infrastruktur pada saat ini perlu diarahkan kepada infrastruktur yang penting dan sangat mendesak memiliki pengaruh langsung kepada penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Investasi dan hilirisasi sektor industri mendukung produksi output bernilai tambah tinggi yang mendorong ekspor dan mengurangi ketergantungan bahan baku dan input dari luar negeri. PMN (Penyertaan Modal Negara) juga perlu diarahkan tidak untuk menjadi sekadar “alat pemadam kebakaran” dan menjadi beban negara. PMN seharusnya memberikan hasil peningkatan pendapatan kepada negara namun juga benar-benar menjadi alat stimulus meningkatnya penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kemen PUPR
Kemen BUMN
Bappenas
Kemen
Perindustrian
DJKN
DJPPR
DJA
- Dit. Abid
Ekontim
- (SD 2, SD 5)

50. Fraksi PKS mendorong Pemerintah agar efisisensi belanja bukan prioritas berupa penghematan belanja barang non operasional seperti perjalanan dinas, paket-paket meeting dan seterusnya harus terus dilakukan. Selain itu tidak melakukan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur yang tidak penting dan tidak mendesak salah satunya adalah pembangunan Ibu Kota Negara kepada belanja penanganan risiko pandemi Covid-19 dan belanja peningkatan kesejahteraan rakyat pada APBN 2022. Optimalisasi manfaat dari pembangunan infrastruktur tergantung pada perencanaan yang tepat sesuai dengan karakteristik wilayah dan dukungan dari masyarakat. Fraksi PKS menilai bahwa belanja infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah belum memiliki daya ungkit pembangunan optimal kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi karena tidak didasarkan kepada kebutuhan masyarakat yang penting dan mendesak seperti kegagalan keselarasan perencanaan pembangunan infrastruktur dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Belanja infrastruktur yang tidak optimal hanya akan menjadi beban mubazir bagi keuangan negara, karena setiap pembangunan infrastruktur diperlukan anggaran untuk pemeliharaannya. Ditambah lagi berdasarkan nota RAPBN 2022, risiko fiskal yang berpotensi memberikan dampak kepada APBN adalah program percepatan infrastruktur (penugasan BUMN) yang berpotensi memengaruhi besarnya kewajiban kontigensi.

Bappenas
Kemen PUPR
BKF
DJA
- Dit. Abid
Ekontim
- (SD 2,SD 5)

51. Fraksi PKS mendorong secara terus menerus agar kualitas dan kuantitas anggaran belanja kesehatan dapat dijaga kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan amanat undang-undang kesehatan yaitu minimal 5 persen dari APBN. Pemerintah perlu memastikan agar belanja kesehatan mempertimbangkan value of money dan efektifitas dalam capaian kinerja output dan outcome termasuk seperti meningkatkan capaian jumlah orang sakit yang berkurang dan jumlah warga gaya hidup sehat yang bertambah. Pemerintah masih harus terus memperbaiki sistem jaminan kesehatan Nasional agar dapat berkelanjutan. Tiga kriteria penting untuk mengukur pemenuhan hak kesehatan adalah ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility) dan mutu (quality). Pemerintah perlu memastikan pelaksanaan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan dari Sistem JKN dalam APBN 2022. Fraksi PKS

Kemenkes
Menko PMK
BKF
DJA-Dit. Abid
PMK, Dit.
HPP
(SD 2,
SD 3)

mencatat dalam RAPBN 2022 belanja fungsi kesehatan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan outlook APBN 2021 sampai 22,9 persen. Penurunan ini perlu untuk menjadi perhatian serius dalam pembahasan selanjutnya.

52. Fraksi PKS mendesak Pemerintah agar insentif tenaga kesehatan tetap dilanjutkan dan Pemerintah dengan serius memperbaiki mekanisme pencairannya. Pencairan insentif tenaga kesehatan masih menjadi persoalan yang belum diselesaikan oleh Pemerintah. Menurut laporan di beberapa media bahwa masih banyak tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan penanganan pandemi Covid-19 yang belum dan terkendala dalam menerima haknya. Fraksi PKS mendesak Pemerintah agar tenaga kesehatan yang telah berjibaku di garda terdepan tidak disibukkan dengan urusan administratif seperti pengisian form yang terlalu banyak dan menyibukan, sehingga dapat mengalihkan perhatian tenaga kesehatan dari pasien kepada urusan administratif. Pemerintah selayaknya pada masa pandemi ini dapat memfasilitasi urusan administratif tersebut dengan sistem informasi yang integratif tanpa harus mengurangi kualitas dan kuantitas ketepatan sasaran insentif tersebut.

Kemenkes
Kemendagri
DJPB
DJA-Dit. Abid
PMK
(SD 2)

53. Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk mendukung dan memfasilitasi UMKM agar naik kelas bahkan berdaya saing internasional. Fraksi PKS memperhatikan bahwa Pemerintah perlu untuk mendukung partisipasi UMKM dalam Ekonomi digital dan Pasar Internasional. Peran UMKM dalam Pasar Internasional diharapkan mampu meningkatkan ekspor langsung dan ekspor tidak langsung oleh UMKM. Mengingat, sektor UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan jumlah pelaku, serapan tenaga kerja, dan kontribusi terhadap PDB, maka UMKM tidak boleh dipandang sebelah mata. Pelaku UMKM yang mencapai 64,1 juta atau mencapai 99 persen dari jumlah pelaku usaha yang ada di Indonesia mampu menyerap tenaga kerja mencapai 116 juta. Kemudian, UMKM juga berkontribusi 58 persen terhadap PDB Indonesia. Namun nilai ekspor UMKM masih berada di angka 16 persen dari total ekspor menurut data Kemenkop (2019). Kebijakan untuk mendukung agar UMKM berdaya saing internasional salah satunya adalah dengan kemampuan akses UMKM melalui aplikasi dan

Menko
Perekonomian
Menkop UKM
Kemendag
Kemen Kominfo
DJPB
DJA-Dit. Abid
Polhukhankam
(SD 4)

internet, kemudian diikuti dukungan terhadap fasilitas pembiayaan atau permodalan.

54. Fraksi PKS mendorong pemerintah program ketahanan dan kedaulatan pangan dengan alokasi anggaran yang memadai. Hal ini sangat penting mengingat permasalahan ketersediaan, kecukupan, dan kenaikan harga-harga pangan selalu berimbas pada turunnya daya beli dan kesejahteraan rakyat secara luas. Fraksi PKS mendorong agar Pemerintah dapat mengoptimalkan sumberdaya lokal untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, khususnya di daerah rawan pangan. Pengembangan pangan lokal harus disinergikan dengan strategi yang tepat, dengan memanfaatkan seluruh potensi lokal untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Pemerintah perlu meneruskan pemberian insentif dan subsidi berusaha tani secara memadai, seperti subsidi benih, subsidi pupuk, asuransi pertanian, jaminan pembelian, dan lain-lain. Demikian juga program-program kesejahteraan dan perlindungan nelayan perlu ditingkatkan. Fraksi PKS juga berpendapat sebaiknya Pemerintah menjalankan amanah Undang Undang dengan membentuk Badan Pangan Nasional.

Kementan
Menko
Perekonomian
Kemendag
KKP
BKF
Bappenas
DJA-
Dit. Abid
Ekontim
(SD 2, SD 4)

55. Fraksi PKS mendorong Pemerintah agar senantiasa mengalokasikan anggaran Pendidikan sebagaimana *mandatory spending* 20 persen dari APBN oleh amanat konstitusi secara efektif dan efisien. Dengan alokasi anggaran tersebut, Indonesia seharusnya mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya yang memiliki keunggulan komparatif dari sisi jumlah penduduk. Namun kenyataan yang terjadi kualitas sumber daya manusia Indonesia belum dapat bersaing secara optimal di wilayah dan global. Maka, alokasi dan realisasi belanja pendidikan oleh Pemerintah selama ini belum optimal keluaran (output) dan terlebih lagi hasilnya (outcome). Terlebih lagi selama masa pandemi covid-19, Pemerintah seperti tidak berdaya dan kebingungan mengatasi pelbagai maslaah yang lahir dari kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Disparitas digital antar daerah di Indonesia sangat tinggi. Sehingga angka putus sekolah bertambah, dan peserta pendidikan dari keluarga miskin tidak dapat mengikuti persekolahan karena tidak memiliki alat komunikasi internet. Kemudian diperparah juga dengan beberapa daerah di

Menko PMK
Kemendikbud
Bappenas
Kemen Kominfo
BKF
DJA-Dit. Abid
PMK
(SD 3)

Indonesia yang tidak mendapatkan jaringan internet. Maka, pembangunan infrastruktur demi terselenggaranya pendidikan daring jarak jauh selama pandemi Covid-19 adalah penting dan mendesak. Kemudian, Fraksi PKS mendesak Pemerintah untuk terus meningkatkan spending better belanja pendidikan agar ketimpangan akses pendidikan terutama menegah ke atas, ketersediaan sarana dan prasana yang belum merata, mismatch pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri dapat segera terselesaikan. Fraksi PKS mencatat terjadi peningkatan anggaran pendidikan 6,1 persen dalam RAPBN 2022 jika dibandingkan dengan outlook APBN 2021.

56. Fraksi PKS mencermati bahwa terjadi penurunan Tunjangan Profesi Guru ASND dalam RAPBN 2022 jika dibandingkan dengan outlook APBN 2021 yaitu dari Rp55,3 triliun menjadi Rp52 triliun. Fraksi PKS mendesak jika penurunan ini mengakibatkan turunnya jumlah penerima yang berhak maka anggaran dalam APBN 2022 harus ditingkatkan. Sedangkan peningkatan jumlah alokasi Tambahan Penghasilan Guru ASND dari outlook 2021 Rp0,4 triliun menjadi Rp1,7 triliun, dan tunjangan Khusus Guru ASND di Daerah Khusus dari Rp1,2 triliun menjadi Rp1,7 triliun tidak hanya sekadar peningkatan alokasi anggaran, namun juga peningkatan Jumlah sasaran Guru yang berhak, baik PNS maupun swasta dan juga kontrak.

57. Fraksi PKS mengingatkan pemerintah bahwa subsidi adalah salah satu bentuk hadirnya negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat dan menjaga daya beli masyarakat. Maka Fraksi PKS mendorong Pemerintah agar alokasi anggaran subsidi tidak berkurang untuk mencukupi jumlah penerima subsidi yang berhak. Fraksi PKS mencatat, Subsidi non energi RAPBN 2022 mengalami penurunan menjadi Rp72,9 triliun yang sebelumnya Rp120,1 triliun berdasarkan outlook 2021. Turunya subsidi non energi disebabkan oleh Pajak DTP yang turun dari Rp32,4 triliun menjadi Rp12,7 triliun, bunga kredit program dari Rp52,7 triliun menjadi Rp29,0 triliun, dan pupuk dari 29,1 triliun menjadi Rp25,3 triliun. Sedangkan, alokasi anggaran subsidi energi dalam RAPBN 2021 mengalami peningkatan, namun perlu dipastikan juga jumlah rakyat penerima manfaat subsidi tidak berkurang. Fraksi PKS mendorong agar belanja subsidi lebih tepat sasaran dari subsidi berbasis komoditas menjadi

Kemendikbud
DJPK
DJA (SD 4)

Kemen ESDM
Menko PMK
BKF
DJA-Dit. PNB
SDA
(SD 4)

subsidi berbasis penerima manfaat, penggunaan metode perhitungan subsidi yang didukung dengan perbaikan basis data yang transparan, dan sistem penyaluran subsidi yang lebih akuntabel.

58. Fraksi PKS berpandangan agar daya beli rakyat menguat dan meringankan beban hidup rakyat, maka Pemerintah perlu menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Roda Dua adalah yang dikecualikan kewajiban pembayarannya sebagai Pajak Provinsi. Fraksi PKS berpandangan hal ini perlu untuk dilakukan agar masyarakat miskin dan rentan yang menggunakan kendaraan bermotor roda dua sebagai bagian dari alat mata pencaharian hidup tidak terbebani setiap tahun untuk mengurus dan membayar Pajak Kendaraan Bermotor roda dua, dan membayar kewajiban Bea Balik Nama Kendaraan bermotor roda dua. Hal ini perlu dilakukan sebagai insentif kepada masyarakat kecil dan berpenghasilan rendah yang pada umumnya menjadikan kendaraan bermotor roda dua sebagai bagian dari alat untuk mencari penghasilan hidup. Fraksi PKS berpandangan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Roda Dua, dan pungutan biaya STNK Motor tersebut dapat ditutup dengan bagi hasil pajak dari pemerintah Pusat terutama dari Pajak Pertambahan Nilai nantinya.

Kemendagri
DJP
DJP
DJP
DJA (SD 4)

59. Kemudian, Fraksi PKS berpandangan agar Surat Izin Mengemudi (SIM) dapat berlaku seumur hidup. Pemberlakuan ini dilakukan agar masyarakat tidak terbebani setiap lima tahun sekali melakukan perpanjangan masa berlaku SIM, baik beban ekonomi maupun beban waktu dan tenaga. Hal ini juga sebagai insentif masyarakat kecil yang sebagian besar menjadikan motor sebagai bagian dari alat transportasi untuk mencari penghasilan. Pembaruan SIM setiap lima tahun sekali dapat merepotkan karena harus mengorbankan waktu produktif atau waktu mencari penghasilan untuk mengurus administrasi perpanjangan masa berlaku SIM. Dengan dihilangkannya kewajiban ini maka dapat mempunyai efek positif kepada penghematan waktu produktif masyarakat. Selain itu, dengan hanya membayar sekali saja pengurusan untuk mendapatkan SIM maka pembebasan ini dapat memberikan keringanan masyarakat. Namun, pemberlakuan ini dapat dievaluasi jika selama

Polri
DJA-Dit. Abid
Polhukhankam
BABUN, Dit.
PNBP KL
(SD 3)

penggunaan SIM terjadi pelanggaran hukum lalu lintas berat atau yang disamakan dengannya sehingga SIM dapat dicabut. Bagi pengendara yang SIM-nya dicabut dapat mengajukan kembali permohonan SIM baru dan menempuh ujian untuk mendapatkan SIM sebagaimana peraturan yang berlaku.

60. Selanjutnya, Fraksi PKS berpandangan agar Pemerintah membebaskan kewajiban pembayaran pajak bagi Wajib Pajak pribadi berpenghasilan sampai dengan Rp8 juta per bulan. Fraksi PKS berpandangan hal ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi rendahnya daya beli dan mengurangi beban kesulitan hidup yang mendera masyarakat kecil dan rentan. Selain itu ada beberapa pertimbangan yang Fraksi PKS berikan di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi stagnan dan pelemahan daya beli masyarakat, kenaikan PTKP belum cukup mendorong daya beli masyarakat, besarnya jumlah kaum muda berpenghasilan menengah ke bawah yang rentan jatuh ke jurang kemiskinan, dibutuhkan stimulus fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Program ini tidak akan membebani APBN secara signifikan, mengurangi beban perusahaan dan mendorong penciptaan lapangan kerja. Fraksi PKS berpandangan bahwa meskipun kebijakan ini akan berdampak pada penurunan penerimaan PPh, namun di sisi lain ini merupakan potensi daya beli yang dapat meningkatkan kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, potensi kehilangan penerimaan PPh tersebut sangat mungkin dikompensasi oleh peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas konsumsi masyarakat yang menguat serta transaksi ekonomi yang meningkat. Selain itu, kehilangan potensi penerimaan PPh tersebut dapat pula ditutup dengan program-program ekstensifikasi dan intensifikasi pengenaan pajak yang perlu terus dimaksimalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tanpa memberatkan masyarakat.
61. Terkait dengan alokasi anggaran untuk fungsi Pertahanan dalam RAPBN 2022 sebesar Rp134,1 triliun atau mengalami peningkatan dibanding outlook 2021 menjadi Rp120,2 triliun dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi APBN 2020 yaitu Rp136,9 triliun. Fraksi PKS menilai hal ini perlu

dikaji lebih dalam pembahasan di DPR, mengingat pentingnya kekuatan pertahanan dengan melanjutkan pemenuhan kekuatan dasar. Fraksi PKS juga memandang bahwa alokasi anggaran pertahanan harus berdampak langsung secara positif terutama terhadap kesejahteraan prajurit, industri pertahanan dan alutsista dalam negeri. Fraksi PKS juga mendorong agar kesejahteraan para prajurit TNI juga dapat ditingkatkan terutama yang menjalankan pengabdian di daerah terpencil dan perbatasan-perbatasan negara. Anggaran Belanja fungsi pertahanan harus berkelanjutan agar jelas capaian output dan outcome yang dicapai pada setiap tahun. Alokasi anggaran pertahanan harus berdampak langsung terutama terhadap kesejahteraan prajurit, industri pertahanan dan alutsista dalam negeri. Fraksi PKS juga mengingatkan bahwa anggaran belanja fungsi pertahanan ini dapat dijaga tata kelolanya dan dipastikan tidak mengalami korupsi karena merupakan belanja yang vital bagi kelangsungan negara.

Menko
Polhukhankam
Kemenhan
DJA-Dit. Abid
Pohukhankam
BABUN
(SD 2)

62. Fraksi PKS menekankan akan pentingnya perlindungan tenaga kerja Indonesia oleh Pemerintah. Di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah tetap perlu menjalankan fungsi perlindungannya terhadap para pahlawan devisa Indonesia di luar negeri. Fraksi PKS memandang bahwa ketimpangan jumlah penduduk yang mencapai ratusan juta jiwa terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan menimbulkan beragam masalah ketenagakerjaan di Indonesia yang perlu diberikan solusi dan penanganan oleh Pemerintah. Fraksi PKS juga mendesak Pemerintah agar jangan sampai salah dalam menganalisa akar masalah hanya untuk alasan mendongkrak investasi besar luar negeri, pemerintah seakan-akan tidak memberikan perlindungan kepada tenaga kerjanya dari bangsanya sendiri.

Kemenlu
Kemenaker
BP2MI
Bappenas
DJA-Dit. Abid
Polhukhankam
BABUN, Abid
Ekontim
(SD 3)

63. Fraksi PKS mendesak agar Pemerintah dapat menekan jumlah utang negara. Jumlah utang yang meningkat mengakibatkan pembayaran bunga utang yang juga terus meningkat. Dalam Anggaran Pembayaran Bunga Utang RAPBN 2022 meningkat menjadi Rp405,9 triliun yang sebelumnya outlook APBN 2021 sebesar Rp366,2 triliun. Fraksi PKS menyoroti terkait dengan meningkatnya pembayaran bunga utang dalam negeri dalam RAPBN 2020 sebesar Rp393,7 triliun, berdasarkan outlook 2021 Rp348,1 triliun. Meningkatnya bunga

pembayaran utang dalam negeri walau tidak berisiko terhadap gangguan kedaulatan negara, namun dapat memberikan indikasi mahal nya sumber pembiayaan (*cost of debt*) dari dalam negeri jika dibandingkan dengan sumber pembiayaan dari luar negeri. Peningkatan jumlah Utang dan Bunga Utang mengakibatkan celah fiskal APBN semakin menyempit, setelah memenuhi *mandatory spending* yang diamanatkan oleh konstitusi. Fraksi PKS mendorong Pemerintah untuk dapat menjalankan manajemen Defisit yang baik sehingga APBN khususnya utang negara dan pembayaran bunga utang dapat optimal dan *value of money*.

DJPPR
DJA (SD 5)

Transfer Ke Daerah & Dana Desa

64. Fraksi PKS memandang penting untuk mengingatkan arah Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2022 dalam pembahasan RAPBN secara umum yakni untuk pemulihan ekonomi, peningkatan kualitas pelaksanaan dan pengawasan guna mendukung peningkatan kinerja daerah. Beberapa hal mendasar yang harus diperhatikan dalam pembahasan TKDD. Pertama, TKDD harus konsisten dan terkendali dengan memperhatikan arah kebijakan, detail perencanaan yang sudah ditetapkan dan mempertimbangkan skala prioritas. Kedua, kebijakan TKDD tahun 2022 harus tetap fokus pada perbaikan kualitas penggunaan, penguatan sinergi penganggaran dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Ketiga, peningkatan kualitas infrastruktur publik, pengembangan potensi, pemulihan ekonomi, dan pembangunan SDM di daerah harus mampu mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan. Keempat, permasalahan keakuratan data, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pengangguran, ketimpangan fiskal antardaerah, kemiskinan, pengangguran, pemerataan teknologi informasi harus mendapat perhatian khusus dalam alokasi TKDD. Kelima, sesuai amanat Undang-Undang Desa telah menempatkan Desa sebagai ujung tombak pembangunan dan diberikan kewenangan serta sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kemendagri
Bappenas
BKF
DJPK
DJA-Dit. Abid
Polhukhankam
BABUN
(SD 4)

65. Anggaran TKDD pada RAPBN tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp770,4 triliun. Anggaran ini kembali menunjukkan tren menurun dibandingkan dengan APBN 2021 yakni sebesar Rp795,5 triliun. Dengan anggaran sebesar Rp770,4 triliun yang direncanakan tahun 2022, maka kembali terjadi penurunan alokasi karena tren TKDD selalu meningkat. Dari Rp766,2 triliun (2018), Rp826,77 triliun (2019), Rp856,94 triliun (2020). Meskipun memang pernah terjadi pemangkasan terhadap anggaran TKDD di tahun 2020 berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 menjadi sebesar Rp763,93 triliun. Rincian TKDD pada RAPBN tahun anggaran 2022 terdiri dari Transfer ke Daerah sebesar Rp702,4 triliun dan Dana Desa sebesar Rp68 triliun. Transfer ke Daerah terdiri dari Dana Perimbangan yang direncanakan sebesar Rp673,7 triliun. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus masing-masing sebesar Rp483,3 triliun dan Rp190,4 triliun. Dana Insentif Daerah (DID) direncanakan Rp7,0 triliun yang terdiri dari DID yang dialokasikan untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebesar Rp4,2 triliun dan DID yang dialokasikan untuk penghargaan kinerja tahun berjalan sebesar Rp2,8 triliun. DID ini mengalami penurunan drastis dari sebelumnya Rp13,2 triliun pada outlook 2021. Sedangkan Dana Otsus dan Keistimewaan DIY direncanakan sebesar Rp21,8 triliun. Fraksi PKS memandang tren penurunan TKDD harus kembali diperhatikan sebagai catatan dalam pembahasan RAPBN tahun anggaran 2022 oleh Pemerintah bersama DPR.

66. Fraksi PKS mengingatkan pemenuhan mandatory spending khususnya pendidikan sebesar 20% sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4), alokasi anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) minimal sebesar 26% dari penerimaan dalam negeri neto, alokasi anggaran Dana Bagi Hasil (DBH), alokasi anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN dan juga alokasi otonomi khusus. Harus diperhatikan penekanan beberapa pos belanja lewat Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam RAPBN 2022 yakni anggaran kesehatan sebesar Rp67,73 triliun, pendidikan sebesar Rp290,5 triliun atau mencapai 53,6 persen dari total anggaran pendidikan tahun 2022. Berikutnya adalah pagu

Kemendagri
Bappenas
BKF
DJPK
DJA-Dit. Abid
Polhukhankam
BABUN
(SD 4)

Kemendagri
Bappenas
BKF
DJPK
DJA-Dit. Abid
Polhukhankam
BABUN
(SD 4)

DAU yang dalam RAPBN tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp378 triliun dan DBH Rp105,3 triliun dimana dalam perhitungan pagu DAU tahun 2022, PDN neto dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan dan PNBPN, dikurangi dengan pendapatan negara yang earmarked dan total Transfer ke Daerah dan Dana Desa selain DAU.

67. Fraksi PKS mengingatkan pentingnya penekanan alokasi anggaran Pendidikan melalui TKDD dalam RAPBN tahun anggaran 2022 yang direncanakan mencapai 53,6 persen dari total anggaran pendidikan tahun 2022 atau sebesar Rp290,5 triliun. Besarnya porsi anggaran pendidikan di TKDD tersebar dalam beberapa komponen yakni Dana Transfer Umum (yang terdiri dari DAU dan DBH) yang diperkirakan untuk bidang pendidikan, Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Nonfisik bidang Pendidikan), Dana Insentif Daerah yang diperkirakan untuk pendidikan, dan Dana Otonomi Khusus yang diperkirakan untuk bidang Pendidikan. Fraksi PKS kembali menggaris bawahi kalimat “diperkirakan untuk bidang pendidikan” sebagai catatan dalam pembahasan RAPBN tahun anggaran 2022.

DJPK
BKF
DJA (SD 4)

68. Fraksi PKS memberikan beberapa catatan atas kenaikan alokasi anggaran Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan untuk mendukung pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta pelaksanaan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp21,8 triliun yang naik dari outlook tahun 2021 sebesar Rp20,8 triliun. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, terdapat beberapa perubahan pengaturan terkait dengan kebijakan Dana Otsus dan DTI bagi Papua, sehingga kebijakan Dana Otsus dan DTI bagi Papua tahun 2022 salah satunya adalah perpanjangan pengalokasian Dana Otsus Papua sampai dengan tahun 2041 dengan peningkatan persentase menjadi sebesar 2,25 persen dari DAU. Catatan pertama, Dana Otsus merupakan salah satu alokasi (transfer) fiskal dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan dukungan untuk menjalankan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam UU Otsus Papua. Maka Dana Otsus tersebut harus mampu memberikan dampak positif termasuk

Kemendagri
Bappenas
BKF
DJPK
DJA-Dit. Abid
Polhukhankam
BABUN
(SD 4)

menstimulus perekonomian yang signifikan pada Orang Asli Papua (OAP). Kedua, kenaikan Dana Otsus ini harus diimbangi dengan peningkatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas. Ketiga, perbaikan kualitas sumber daya manusia aparatur birokrasi, baik di level provinsi maupun kabupaten dan kota untuk memanfaatkan Dana Otsus secara optimal. Keempat, alokasi Dana Otsus per sektor harus dilakukan dengan tepat dan akurat khususnya sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur, perencanaan dan monitoring evaluasi, bantuan afirmasi serta program prioritas. Kelima, pemberian “punishment” atas hasil evaluasi bagi daerah yang dianggap gagal mencapai target sasaran sebagai pelajaran penting karena Dana Otsus pada dasarnya dana rakyat yang harus digunakan untuk kepentingan rakyat Papua.

69. Fraksi PKS mengingatkan bahwa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN dan diperuntukkan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sesuai amanat Pasal 72 ayat (1) huruf b UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggaran Dana Desa dialokasikan dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa dialokasikan dengan tujuan agar desa mempunyai sumber pendapatan yang memadai untuk mendanai kewenangan yang diberikan kepada desa. Dana Desa bagi sebagian desa yang masuk dalam kategori minus merupakan sumber pembiayaan andalan dan menempati porsi terbesar dari total pendapatan desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Untuk itu, Fraksi PKS menekankan bahwa kualitas Dana Desa dipengaruhi oleh penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah desa, masyarakat maupun tenaga pendampingan desa.

70. Fraksi PKS berpandangan bahwa satu bentuk *quality control* terhadap TKDD adalah dengan memperbaiki koordinasi antara pusat dan daerah. Hal ini sangat penting untuk memastikan anggaran yang berkualitas, menghindari lambatnya penyerapan anggaran sampai dengan ketepatan pelaporan. Kondisi pandemi Covid-19 yang masih belum selesai menuntut keputusan

Kemendes
PDTT
Kemendagri
BKF
DJPk
DJA (SD 4)

Kemendes
PDTT
Kemendagri
BKF
DJPk
DJA (SD 4)

keuangan yang cepat dan tepat dengan mengedepankan prioritas, transparansi, akuntabilitas dan adanya penegakan hukum untuk terwujudnya tata kelola keuangan yang baik.

Defisit dan Pembiayaan

71. Fraksi PKS memandang Pemerintah dalam menetapkan defisit APBN 2022 sebesar Rp868,02 triliun atau 4,85 persen masih terlalu lebar. Rencana defisit yang tinggi menggambarkan tidak adanya optimisme pemerintah dalam menargetkan pendapatan negara. Sementara anggaran belanja dengan kebijakan *refocussing*, masih memberikan celah adanya ketidakefisienan. Angka defisit pada 2022 semestinya dapat lebih ditekan dengan mempertimbangkan bahwa pada 2023 Pemerintah wajib kembali tunduk kepada Undang-Undang Keuangan Negara terkait angka tiga persen sebagai batas maksimal defisit anggaran. Lebih lanjut, defisit membawa risiko bawaan berupa bertambahnya utang Pemerintah untuk memenuhi anggaran belanja yang kian meningkat pada situasi pendapatan yang makin terpuruk.
72. Fraksi PKS memberi peringatan kepada Pemerintah untuk tidak memanfaatkan keleluasaan relaksasi defisit anggaran yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 dengan tidak memerhatikan risiko jangka panjang. Angka defisit sebesar 4,85 persen dalam RUU APBN 2022 merupakan rentang terdalam defisit dalam kesepakatan pada saat pembahasan KEM PPKF 2022. Kemudian jika melihat situasi pandemi saat ini, yang penuh dengan ketisakpastian dan adanya payung hukum kelonggaran defisit, maka tidak menutup kemungkinan bahwa angka defisit anggaran dapat lebih lebar. Fraksi PKS mengingatkan bahwa defisit membawa serta dampak negatif berupa pembiayaan utang. Oleh karena itu, Pemerintah tidak boleh memanfaatkan keleluasaan defisit anggaran tanpa mempertimbangkan beban bunga utang yang harus ditanggung APBN dalam jangka panjang dan tidak memperhitungkan dengan cermat tingkat produktivitas setiap Rupiah yang dikeluarkan.
73. Fraksi PKS berpandangan estimasi tambahan pembiayaan utang sebesar Rp973,6 triliun pada TA 2022 belum menggambarkan komitmen Pemerintah

BKF
DJPPR
DJA
(SD 1 dan 5)

BKF
DJPPR
DJA (SD 5)

dalam menekan jumlah utang. Sebagai catatan, posisi utang Pemerintah sampai dengan akhir Juni 2021 mencapai Rp6.554,56 triliun atau 42,35 persen terhadap PDB, serta *outlook* tambahan utang pada akhir tahun 2021 sebesar Rp1.027 triliun. Kemudian dengan anggaran pembiayaan utang TA 2022 tersebut, akan memosisikan utang Pemerintah pada angka 44,28 persen terhadap PDB. Pada 2014 jumlah akumulasi utang pemerintah sebesar Rp 2.608 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 24,7 persen. Dengan demikian, dalam rentang 8 tahun akumulasi utang bertambah lebih dari dua kali lipat. Meningkatnya total utang juga berdampak pada rasio pembayaran utang terhadap pendapatan atau *debt to service ratio* (DSR) yang juga tercatat meningkat.

BKF
DJPPR
DJA (SD 5)

74. Fraksi PKS mengingatkan Pemerintah tentang dampak negatif terus melonjaknya utang terhadap kesinambungan fiskal. Porsi belanja beban utang bunga berbanding lurus dengan terus meningkatnya jumlah utang Pemerintah. Meningkatnya *debt to service ratio* (DSR) artinya bahwa penambahan pembiayaan utang pemerintah pada tahun berjalan sebagian besar alokasinya digunakan untuk pembayaran pokok dan beban bunga utang. Dinyatakan bahwa anggaran pembayaran bunga utang meningkat menjadi Rp405,9 triliun pada 2022, peningkatan tersebut secara langsung mengurangi fleksibilitas belanja fiskal pada yang dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, seperti anggaran pendidikan dan kesehatan.
75. Porsi utang yang sebagian besar berbentuk surat berharga sangat rentan dengan tingkat suku bunga, baik domestik maupun global. Di mana beban bunga utang yang harus dibayarkan mengacu pada kedua suku bunga tersebut. Pemerintah perlu ekstra waspada dengan adanya percepatan pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang dapat memengaruhi penetapan suku bunga pada 2022. Apabila hal ini terjadi, maka estimasi beban bunga utang akan mengalami perubahan.
76. Fraksi PKS mendesak Pemerintah segera memperbaiki defisit keseimbangan primer menjadi surplus kembali dalam jangka waktu menengah. Proyeksi APBN 2022 level keseimbangan primer pada negatif Rp462,15 triliun atau 2,65 persen terhadap dinilai masih sangat tinggi. Hal ini berarti

BKF
DJPPR
DJA (SD 5)

BKF
DJPPR
DJA (SD 5)

BKF
DJPPR
DJA (SD 5)

kesinambungan fiskal masih menjadi 'pekerjaan rumah' bagi Pemerintah, di mana jumlah pendapatan negara masih jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan belanjanya. Beban bunga utang dibayar menggunakan penerbitan utang baru dengan biaya yang tidak murah.

77. Fraksi PKS menegaskan Pemerintah harus mengkaji secara mendalam tentang anggaran pembiayaan investasi dengan didasarkan pada evaluasi, prioritas serta memperhatikan keuangan negara. Tercatat bahwa pembiayaan investasi 2022 dianggarkan sebesar Rp182,32 triliun dengan hampir 50 persen (Rp86,4 triliun) digunakan untuk kebutuhan infrastruktur. Antara lain adalah PMN kepada PT PII, PMN kepada Perum Perumnas dan investasi kepada Badan Layanan Umum Lembaga ManajFemen Aset Negara (BLU LMAN). Investasi dalam bidang infrastruktur di tengah pandemi hanya akan mencederai rakyat, karena terlihat bagaimana Pemerintah mengutamakan proyek-proyek ambisius dibanding dengan keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya sendiri.
78. Berkaca dari APBN 2021, dimana *outlook* penambahan dana investasi kepada BUMN mencapai lebih dari 100 persen realisasi dana investasi BUMN 2020. Fraksi PKS menilai sejumlah investasi dalam bentuk PMN tidak memerhatikan kemampuan keuangan negara. Di saat pandemi, di mana kebutuhan keuangan seharusnya dioptimalkan untuk penanganan krisis kesehatan dan pemulihan ekonomi, ironinya Pemerintah justru sibuk melakukan penyelamatan BUMN yang bermasalah yang terindikasi karena korupsi, *moral hazard*, buruknya *corporate governance* dan manajemen internal. Dana APBN semestinya diprioritaskan untuk penanganan dampak pandemi dan percepatan pemulihan ekonomi nasional.
79. Fraksi PKS mendesak Pemerintah agar dapat semaksimal mungkin menekan timbulnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada akhir tahun 2022. Pemerintah nampaknya belum memberikan konsentrasi terhadap dampak negatif adanya SiLPA setiap tahun anggaran. Terbukti tren kenaikan SiLPA dari tahun 2014 sampai 2019 tidak dapat dihindari. Jumlah SiLPA diperparah ketika memasuki masa pandemi dimana pada 2020 mencapai Rp245,59 triliun dan per April 2021 tercatat sebesar Rp254,19 triliun. Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK Saldo Anggaran Lebih (SAL) 2020 sebesar Rp388,12 triliun.

DJKN
DJPB
DJA-Dit. Abid
Polhukhankam
BABUN
(SD 5)

Kemen BUMN
DJKN
DJA (SD 5)

DJPB
DJA (SD 5)

Oleh karena itu, Fraksi PKS menyerukan bahwa Pemerintah wajib melakukan perbaikan perencanaan keuangan dan program serta pengelolaan utang yang lebih bersifat produktif.

Hadirin yang Kami Muliakan,

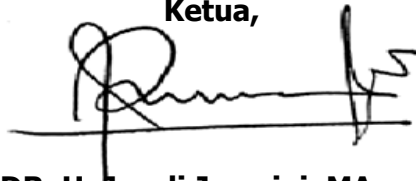
Demikian pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI terkait Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya agar dapat menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti dalam pembahasan selanjutnya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wallahul Muwafiq ila Aqwamith Thoriq, Billahi Taufiq wal Hidayah,
Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 10 Muharram 1443 H
19 Agustus 2021 M

**PIMPINAN
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,



DR. H. Jazuli Juwaini, MA.
A-449

Sekretaris,



Hj. Ledia Hanifa, A. S.Si. M.Psi. T.
A-427